TESIS

ANALISIS CAPAIAN AKSES AIR MINUM JARINGAN PERPIPAAN KOTA BEKASI

Disusun Oleh:

NAMA : M. ALI IRMANDA

NPM : 2062001018

JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK

PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA

KONSENTRASI : MANAJEMEN PEMBANGUNAN DAERAH

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr.A.P)



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
PROGRAM MAGISTER TERAPAN
TAHUN 2023



LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama

: M. Ali Irmanda

NPM

: 2062001018

Jurusan

: Administrasi Publik

Program Studi

: Administrasi Pembangunan Negara

Konsentrasi

Manajemen Pembangunan Daerah

Judul Tesis (Bahasa Indonesia)

Analisis Capaian Akses Air Minum Jaringan

Perpipaan Kota Bekasi

Judul Tesis (Bahasa Inggris)

: Analysis of Achievement of Drinking Water

Pipeline Network Access in Bekasi City

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan Pembimbing Tesis

Pembimbing

Pembimbing II

Dr. Edy Sutrisno, M.Si

Dr. Bambang Giyanto, SH, M.Pd



LEMBAR PENGESAHAN

Nama : M. Ali Irmanda

NPM : 2062001018

Jurusan : Administrasi Publik

Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara Konsentrasi : Manajemen Pembangunan Daerah

Judul Tesis : Analisis Capaian Akses Air Minum Jaringan

Perpipaan Kota Bekasi

Telah mempertahankan tesis di hadapan penguji tesis Program Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara, P:oliteknik STIA LAN Jakarta

Lembaga Administrasi Negara, Pada:

Hari : Jumat

Tanggal: 15 Desember 2023

Pukul : 16.00

TELAH DINYATAKAN LULUS

PENGUJI TESIS:

Ketua Sidang : Dr. R. Luki Karunia, MA

Sekretaris : Dr. R.N. Afsdy Saksono, M.Sc.

Anggota : Dr. Asropi, M.Si.

Pembimbing I : Dr. Edy Sutrisno, M.Si

Pembimbing II : Dr. Bambang Giyanto, M.Pd

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini;

Nama : M. Ali Irmanda

NPM : 2062001018

Jurusan : Administrasi Publik

Program studi : Administrasi Pembangunan Negara

Konsentrasi : Manajemen Pembangunan Daerah

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan tesis yang telah saya buat ini dengan judul Analisis Capaian Akses Air Minum Jaringan Perpipaan Kota Bekasi merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila dikemudian hari penulisan Tesis ini merupakan hasil plagiat dan penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan atau ketentuan yang berlaku di Politeknik STIA LAN Jakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Jakarta, Desember 2023

Penulis,

M. Ali Irmanda

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena hanya dengan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan Tesis yang berjudul "Analisis Capaian Akses Air Minum Jaringan Perpipaan Kota Bekasi".

Selama proses penulisan Tesis ini, begitu banyak bantuan dan dukungan yang diterima penulis dari berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- Ibu Prof. Dr. Nurliah Nurdin, MA., selaku Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta.
- 2. Bapak Dr. Edy Sutrisno, M.Si., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Bambang Giyanto, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, koreksi dan motivasi kepada penulis dengan penuh kesabaran dan ketulusan hingga selesainya tesis ini.
- 3. Bapak Prof. Dr. R. Luki Karunia, MA, Bapak Dr. R.N. Afsdy Saksono, M.Sc., dan Bapak Dr. Asropi, M.Si., selaku dosen pembahas dan penguji atas masukan dan saran yang berguna dan signifikan, yang semuanya berkontribusi terhadap perbaikan tesis ini.
- 4. Pihak-pihak di Pemerintah Kota Bekasi yang menjadi lokus penelitian.

 Terima kasih banyak atas waktu dan data serta informasi yang bermanfaat untuk penelitian ini.
- 5. Istriku tercinta dr. Sri Habibah Sari Melati, MKK., dan putriku tersayang Khanza atas doa, harapan dan dukungan tanpa batasnya. Terima kasih tidak bosan-bosannya terus mendorong dan memberikan semangat untuk menyelesaikan penulisan tesis ini.
- Almarhum Papa dan Almarhumah Mama, yang dulu selalu mendoakan dan berharap anaknya lulus S2. Alhamdulillahhi rabbil 'aalamiin akhirnya ya Pa, Ma...

- 7. Almarhum Tulang mertua dan Nantulang mertua untuk doa dan dukungannya.
- 8. Rekan-rekan di Ditjen Bina Pembangunan Daerah atas dukungannya, terima kasih khusus saya sampaikan kepada Pak Didi dan Pak Rendi yang menjadi rekan diskusi selama ini.
- 9. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran beserta kritikan yang membangun sangat diharapkan. Semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, Desember 2023

Penulis

POLITEKNIK STIALAN JAKARTA

ABSTRAK

ANALISIS CAPAIAN AKSES AIR MINUM JARINGAN PERPIPAAN KOTA BEKASI

M. Ali Irmanda, Edy Sutrisno, Bambang Giyanto irmanda.ali@gmail.com
Politeknik STIA LAN Jakarta

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab capaian akses air minum jaringan perpipaan Kota Bekasi masih di bawah target nasional dan untuk menyusun strategi dalam meningkatkan capaian akses air jaringan perpipaan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan analitik. Hasil penelitian menunjukkan beberapa faktor penyebab rendahnya capaian akses air minum jaringan perpipaan Kota Bekasi. Pertama, perbandingan antara penambahan jumlah SR/akses air minum jaringan perpipaan dan peningkatan jumlah penduduk tidak seimbang. Kedua, pembangunan sektor air minum belum menjadi prioritas. Ketiga, pengelolaan DAK air minum belum optimal. Keempat, Capaian output kegiatan DAK belum optimal. Kelima, keterbatasan sumber air baku dan tingginya harga produksi.

Kata kunci: Dana Alokasi Khusus, Layanan Air Minum, Pembangunan Daerah



ABSTRACT

ANALYSIS OF ACHIEVEMENT OF DRINKING WATER PIPELINE NETWORK ACCESS IN BEKASI CITY

M. Ali Irmanda, Edy Sutrisno, Bambang Giyanto irmanda.ali@gmail.com
Politeknik STIA LAN Jakarta

The purpose of the study is to identify the rationale for the progress of access for water supply pipeline networks in Bekasi City that remains below the national target and to develop an appropriate strategy for increasing the access achievement of pipeline water supply networks. The method used is a qualitative method with a descriptive and analytical approach. The research results show several factors causing the low achievement of access to drinking water in the Bekasi City pipe network. First, the comparison between the increase in the number of SR/piped access to drinking water and the increase in population is not balanced. Second, development of the drinking water sector has not been a priority. Third, poor management of DAK for water supply. Fourth, the output of DAK activities has not been maximized. Fifth, limited raw water sources and high production costs.

Keywords: Special Allocation Fund, Drinking Water/Water Supply Service, Regional Development

STIA LAN JAKARTA

DAFTAR ISI

HALA	MAN JUDUL	. i.
LEMB	AR PERSETUJUAN TESIS	, ii
LEMB	AR PENGESAHAN	iii
LEMB	AR PERNYATAAN	iv
KATA	PENGANTAR	. v
	RAK	
	<i>RACT</i> v	
DAFT	AR ISI	ix
	AR TABEL DAN GRAFIK	
DAFT	AR GAMBARx	iii
BAB I		. 1
PERM	ASALAHAN PENELITIAN	. 1
A.	Latar Belakang.	. 1
	Identifikasi Masalah	
C.	Rumusan Permasalahan	17
D.	Tujuan Penelitian	17
E.	Manfaat Penelitian	17
	I	
	UAN PUSTAKA	
A.	Penelitian Terdahulu	19
B.	Tinjauan Kebijakan dan Teoritis	
1.	Tinjauan Kebijakan	23
2.	Tinjauan Teoritis	28
	a. Desentralisasi	28
	b. Good Governance	30
	c. Kebijakan Publik	31
	d. Fungsi Pemerintahan	33
	e. Pembangunan Daerah	34
	f. Manajemen Pembangunan	38
C.	Konsep Kunci	39

		1.	Per	encanaan DAK Fisik	39
		2.	Pen	gorganisasian DAK Fisik	40
		3.	Pela	aksanaan Kegiatan DAK Fisik	40
		4.	Mo	nitoring dan Evaluasi DAK Fisik	41
	D.	Ke	erang	ka Berpikir	41
BAE	3 II	I	•••••		45
ME	ГО	DO	LO	GI PENELITIAN	45
	A.	M	etode	e Penelitian	45
	В.	Ot	ojek l	Penelitian	46
	C.	Te	knik	Pengumpulan Data	46
				wancara	
		2.	Tela	aah Dokumen	48
	D.	Te	knik	Pengolahan dan Analisis Data	48
BAE	3 IV	V	•••••		51
HAS	SIL	PE	ENE	LITIAN	51
	A.	Ga	ımba	ran Umum Penelitian	51
	1.	Pr	ofil I	Kota Bekasi	51
	2.	Inf	form	an Penelitian	54
	B.	Pe	mbal	hasan dan Analisis Hasil Penelitian	55
		1.	Fak	tor-Faktor Penyebab Capaian Akses Air Minum Jaringan	
			Per	pipaan Kota Bekasi di Bawah Target Nasional	55
			a.	Perbandingan Penambahan SR dan Peningkatan Jumlah Penduduk	55
			b.	Pembangunan Sektor Air Minum Kurang Menjadi Prioritas	58
			c.	Pengelolaan DAK Air Minum Belum Optimal	66
			d.	Output DAK Air Minum	84
			e.	Keterbatasan Sumber Air Baku dan Tingginya Biaya Produksi.	87
		2.		ntegi Pemerintah Kota Bekasi Meningkatkan Capaian Akses Air num Jaringan Perpipaan	
			a.	Percepatan Peningkatan Capaian Akses Perpipaan	88
			b.	Peningkatan Pengelolaan DAK Air Minum	91
			c.	Dukungan SDM dan Efektivitas Kelembagaan	95
			d.	Pemanfaatan Sumber Pendanaan Alternatif	97
BAE	3 V	•••••	•••••		99
KES	SIN	ΙPU	J LA !	N DAN SARAN	99

A.	. Kesimpulan	99
	Faktor-Faktor Penyebab Capaian Akses Air Minum Jaringan Perpipaan Kota Bekasi di Bawah Nasional	99
	Strategi Pemerintah Kota Bekasi Meningkatkan Capaian Akses Minum Jaringan Perpipaan	
B.	Saran	102
DAFT	'AR PUSTAKA	105



POLITEKNIK STIALLAN JAKARTA

DAFTAR TABEL DAN GRAFIK

A. Daftar Tabel

Tabel 1 Capaian Beberapa Indikator Pembangunan Kota Bekasi tahun 2021 1	1
Tabel 2 Daftar Key Informan	7
Tabel 3 Penduduk Miskin Kota Bekasi 2018-2022	3
Tabel 4 Penambahan SR Kota Bekasi 2021-20225	7
B. Daftar Grafik	
Grafik 1 Perkembangan Alokasi DAK Fisik Nasional 2018-2022	4
Grafik 2 Perkembangan Alokasi DAK Fisik Kota Bekasi 2018-2022 1	0
Grafik 3 Alokasi DAK Air Minum Kota Bekasi 2019-2022 (dalam ribu rupiah) 1	3
Grafik 4 Alokasi dan Realisasi DAK Air Minum Kota Bekasi 2020-2022 5	6
Grafik 5 Capaian Akses Air Minum Jaringan Perpipaan Kota Bekasi 5	6

POLITEKNIK STIALLAN JAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2 Kerangka Berpikir	42
Gambar 3 Bagan alur pengolahan dan analisis data	
Gambar 4 Peta Batas Administrasi Kota Bekasi	52



POLITEKNIK STIALLAN JAKARTA

BABI

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang

sebagai sistem pengelolaan Desentralisasi (otonomi daerah) pembangunan negara dipilih oleh Indonesia minimal untuk membenahi dua sisi, yaitu sisi administratif-politik atau tata pemerintahan dan sisi keuangan negara. Fokus pada pembenahan tata pemerintahan diimplementasikan dengan segera menetapkan regulasi terkait pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sementara fokus pada perbaikan sistem keuangan negara diterapkan dengan mengundangkan regulasi terkait perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Maka sejak dimulainya era otonomi daerah pada 1999, landasan hukum pelaksanaan desentralisasi di Indonesia adalah dua Undang-Undang beserta pengganti dan turunannya terkait dengan pembagian kewenangan pemerintahan dan perimbangan keuangan. Dua pembenahan di sisi tata pemerintahan dan keuangan tersebut kemudian diharapkan memiliki implikasi terutama pada perbaikan pelayanan publik. Imbasnya, desentralisasi lebih luas diimplementasikan untuk membatasi praktik yang tidak demokratis dari sistem sentralistik, mengefektif dan efisienkan anggaran pembangunan (keuangan negara), dan mendekatkan sekaligus menumbuhkan profesionalitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Dalam skema desentralisasi Indonesia, dua pilar utama yang membedakannya dengan sistem sentralistik otoriter adalah pada urusan administratif pengelolaan negara dan perimbangan keuangan. Desentralisasi merestrukturisasi tata negara dengan melakukan pembagian kewenangan pemerintahan dan mengubah postur keuangan negara dengan melakukan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Kewenangan pelaksanaan urusan pemerintahan dalam rezim desentralistik tidak lagi terpusat pada pemerintah pusat, melainkan dilakukan pembagian atas apa dan mana saja

yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan mana saja yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Sehingga tidak ada kewenangan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dimonopoli oleh level pemerintahan tertentu.

Sementara dari sisi keuangan, desentralisasi membawa konsekuensi pada perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini dilakukan tidak hanya karena daerah tidak cukup memiliki kapasitas keuangan untuk membiayai pembangunannya secara mandiri, tetapi juga karena sumber pendapatan negara tersebar berasal dari daerah-daerah, maka pengelolaannya butuh perimbangan. Pengelolaan keuangan yang terbagi membawa pada penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang lebih efektif, efisien, sekaligus akuntabel. Faktornya pertama tentu karena kebutuhan laporan baik kepada masyarakat yang diwakili lembaga legislatif maupun kepada level pemerintah yang lebih tinggi (seperti kasus dana transfer). Berikutnya, penggunaan anggaran yang terdesentralisasi menjadi lebih efektif dan efisien karena digunakan untuk menjawab persoalan pembangunan dan pelayanan masyarakat oleh institusi yang lebih tahu inti persoalannya, yaitu pemerintah daerah ketimbang semuanya diurusi oleh pemerintah pusat.

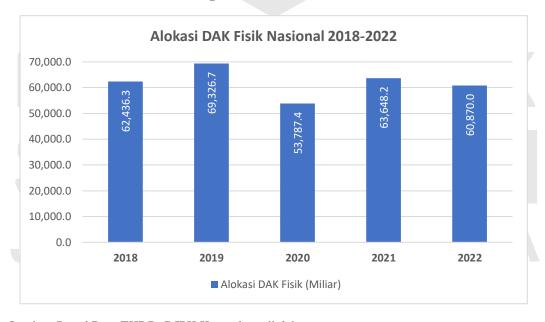
Selain administratif-politik dan keuangan, desentralisasi diterapkan untuk memperbaiki pelayanan publik oleh pemerintah. Disini, desentralisasi diyakini akan dapat memperbaiki dan meningkatkan kuantitas maupun kualitas pelayanan publik oleh pemerintah. Rasionalisasinya adalah karena pemerintah daerah lebih mengetahui inti permasalahan pembangunan dan kebutuhan pelayanan publik dari masyarakat, maka desentralisasi yang memberikan lebih banyak kewenangan kepada pemerintah daerah diyakini akan lebih menjamin penyediaan barang-barang dan pemenuhan kebutuhan pelayanan publik oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Singkatnya, dari sisi pemerintah daerah, restrukturisasi kewenangan dan keuangan dalam konteks otonomi daerah diyakini berdampak pada perbaikan pengelolaan pemerintahan dan keuangan di daerah, yang pada akhirnya membawa pada perbaikan kinerja pelayanan publik oleh pemerintah daerah.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah didanai dari pendapatan daerah. Namun, kemampuan keuangan daerah sangatlah terbatas. Maka, dalam skema desentralisasi, kekurangan anggaran pembangunan daerah kemudian dibantu oleh pemerintah pusat melalui mekanisme dana perimbangan. Indonesia mengenal dana perimbangan dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), di samping Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Dana Insentif Daerah, serta Dana Desa. DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional dan menjadi urusan daerah (UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 55 Tahun 2005).

DAK mengalami metamorfosis baik pada cakupan bidang kegiatan maupun nilai alokasinya. Dari hanya memiliki lima bidang pada tahun 2003, DAK kemudian mencakup belasan (sampai 19 bidang) mulai tahun 2012, dan kemudian kembali mengalami penyederhanaan menjadi 10 bidang mulai tahun 2015. Sementara dari sisi jenisnya, DAK yang semula hanya mencakup DAK fisik kemudian diperluas dengan mencakup DAK non-fisik (mulai dialokasikan tahun 2016 sampai sekarang). Dalam fase tersebut, DAK juga memperkenalkan berbagai bentuk, mulai dari hanya DAK reguler, kemudian ditambahkan DAK afirmasi, dan DAK infrastruktur pubik daerah (IPD) yang mulai dialokasikan pada 2016, meskipun kemudian kembali hilang pada tahun 2017 dengan memunculkan konsep baru DAK penugasan. Maka sejak tahun 2017 tersebut, DAK fisik terbagi menjadi DAK reguler, DAK penugasan, dan DAK afirmasi. Kemudian dari 2021 sampai dengan 2022, DAK afirmasi tidak lagi dialokasikan, dan DAK fisikpun kemudian hanya terdiri dari DAK reguler dan DAK penugasan (Portal Data TKDD DJPK Kemenkeu).

Sedangkan dari sisi anggaran, khusus untuk DAK yang kegiatannya berupa pembangunan fisik, total nilai alokasinya meningkat dari hanya Rp 2,27 triliun pada tahun 2003 ketika DAK pertama kali diberikan kepada daerah menjadi Rp 89,8

triliun pada tahun 2016. Meskipun setelahnya alokasi DAK ke daerah kembali mengalami penurunan menjadi 58,4 triliun (2017) dan tidak lagi mencapai total alokasi lebih dari 80 triluan dalam lima tahun terakhir. Total alokasi DAK fisik pada tiap tahun sejak 2018 sampai dengan 2022 berada di kisaran 60-an triliun. Alokasi tertingginya pernah mencapai 69,3 triliun pada tahun 2019, kemudian setelah Covid-19 alokasi DAK fisik menurun dengan total nilai terrendah pada tahun 2020 yang hanya mencapai Rp 53,8 triliun. Meski begitu, jika dilihat secara umum dari awal pengalokasiannya pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2022, total alokasi dana transfer dalam bentuk DAK fisik secara nasional sebagai bagian dari dana perimbangan dalam penerapan desentralisasi fiskal yang mengiringi demokratisasi politik dan tata pemerintahan jumlahnya berada dalam trend yang meningkat. Grafik alokasi DAK fisik secara nasional dalam lima tahun terakhir (2018-2022) terlihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 1 Perkembangan Alokasi DAK Fisik Nasional 2018-2022

Sumber: Portal Data TKDD, DJPK Kemenkeu, diolah

Berdasarkan grafik alokasi DAK fisik di atas, dalam lima tahun terakhir total alokasi DAK fisik cenderung menurun, bahkan pernah mencapai -22% jika melihat perbandingan antara alokasi DAK fisik tahun 2019 dan 2020. Meski tidak

sedikit daerah yang merasa masih sangat kekurangan alokasi DAK fisik, angkaangka di atas jelas jelas merupakan nominal yang tidak kecil. Alokasi yang besar
tersebut diharapkan membawa dampak positif pada pembangunan daerah dan
pemerataan antar wilayah dan akhirnya berdampak pada semakin membaiknya
sasaran pembangunan nasional. Sayangnya, beberapa temuan menunjukkan kondisi
sebaliknya. Catatan Bappenas sebagaimana di sampaikan dalam buku Analisis
Perspektif, Permasalahan, dan Dampak dana Alokasi Khusus (DAK): White Paper
(2011) menyatakan bahwa sampai dengan 2010-an DAK belum cukup
memperlihatkan kontribusi terhadap tujuan pembangunan nasional. Lebih lanjut
buku yang juga dikenal dengan DAK White Paper tersebut menyatakan bahwa
penyebab dari tidak adanya kontribusi DAK terhadap pembangunan nasional
adalah bukan karena terlalu kecilnya alokasi DAK, melainkan karena kurang efisien
dan efektifnya pengalokasian dan tata kelola implementasi DAK.

Secara lebih spesifik permasalahan DAK sebagaimana disebutkan dalam buku *DAK White Paper* setidaknya terjadi karena pendekatan DAK yang lebih berorientasi input. DAK hanya dapat dibelanjakan untuk jenis input tertentu yang sudah ditetapkan dalam petunjuk teknis. Permasalahan selanjutnya, perencanaan dan pengalokasian DAK lebih bersifat top down, sehingga daerah kurang diberi ruang kreasi yang cukup luas. Masalah lainnya karena petunjuk teknis pelaksanaan DAK sering terlambat diterbitkan dan sering berubah tanpa memperhatikan kebutuhan daerah.

Permasalahan implementasi DAK juga ditemukan dalam audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada tahun 2011. Peraturan Kepala BPKP No. PER-875/K/D4/2011 memperlihatkan bahwa DAK memiliki banyak permasalahan. Beberapa masalah krusial yang dapat disebutkan sampai dengan periode tersebut diantaranya adalah (a) laporan yang disusun daerah tidak sesuai dengan bukti pengeluaran. Temuan BPKP lainnya adalah bahwa (b) penyerapan massif oleh daerah cenderung dilakukan menjelang akhir tahun anggaran; (c) banyak terjadi penggunaan alokasi DAK yang tidak tepat

sasaran; serta (d) jumlah dana yang dicairkan tidak sesuai dengan kinerja pembangunan fisik yang dilaksanakan; bahkan (e) banyak daerah yang hanya mencairkan alokasi DAK pada tahap pertama saja dan tidak menariknya lagi pada tahap-tahap berikutnya.

Dalam konteks yang sama, Sekretraiat Bersama DAK (Sekber DAK) yang dikoordinasi oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri dalam laporan tahunannya juga mencatat permasalahan atau kendala yang masih terus dihadapi oleh daerah dalam pengelolaan DAK. Permasalahan pengelolaan DAK ini oleh Sekber DAK dibagi ke dalam tiga kelompok yaitu perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta monitoring-evaluasi dan pelaporan (Sekber DAK, 2016). Pengelompokkan permasalahan pengelolaan DAK yang hampir sama juga diberikan oleh Kementerian PUPR sebagai pembina teknis pengelolaan DAK infrastruktur ke-PU-an. Dalam overview monitoring dan evaluasi DAK bidang air minum, sanitasi, dan perumahan & permukiman tahun 2022, permasalahan pelaksanaan DAK dibagi oleh KemenPUPR ke dalam permasalahan di sektor perencanaan dengan mendetilkannya menjadi permasalahan perencanaan dan pemrograman; permasalahan pelaksanaan; Permasalahan monev dan pelaporan yang didetilkan menjadi permasalahan pelaporan dan permasalahan pemantauan dan evaluasi.

Permasalahan di sektor perencanaan dan penganggaran yang dihadapi oleh daerah dalam pengelolaan DAK antara lain terlambatnya penyampaian Juknis dan Juknis yang kerap mengalami perubahan substansi pada tiap tahunnya. Hal ini berimplikasi pada terjadinya revisi rencana kerja anggaran (RKA) yang telah disusun oleh daerah berdasarkan juknis yang lama, yang pada ujungnya akan menghambat pelaksanaan DAK di daerah. Permasalahan lain di sektor perencanaan dan penganggaran adalah tertutupnya penetapan satuan harga dan menu kegiatan dalam Juknis. Dampak utama hal ini pada penyusunan perencanaan (penyusunan RKA) adalah kondisi membingungkan di daerah diman mereka dihadapkan pada dualisme penetapan satuan harga: satuan harga yang di tetapkan oleh kepala daerah

dan satuan harga yang ditetapkan dalam Juknis DAK. Implikasi lebih lanjut apabila dalam penyusunan RKA daerah menggunakan satuan harga yang ditetapkan dalam satuan juknis berimplikasi pada kebingungan calon penyedia jasa, bahkan bisa jadi tidak ada perusahaan yang akan mengajukan penawaran sehingga pembangunan fisik dari alokasi DAK tidak dapat dilaksanakan. Selain satuan harga, ketertutupan dalam juknis juga adalah terkait menu kegiatan DAK. Akibatnya daerah tidak bisa menyesuaikan kegiatan-kegiatan yang prioritas berdasarkan pemetaan daerahsendiri. Selain itu menu yang tertutup juga menyebabkan daerah terpaksa melaksanakan kegiatan-kegiatan yanng sebenarnya tidak ada manfaatnya untuk daerah tersebut.

Kendala lain yang dihadapi dalam pengelolaan DAK adalah penyampaian pagu DAK yang kerap terlambat, baru disahkan setelah APBD ditetapkan. Model penetapan alokasi DAK yang demikian berdampak pada perlunya daerah melakukan perubahan mendahului APBD. Perubahan seperti ini dilaksanakan dengan cara melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD yang mana langkah ini kerap mendapat tentangan dari DPRD. Akibat terburuk berikutnya adalah seluruh bidang DAK yang diterima daerah tidak dapat dilaksanakan pada tahun anggaran yang bersangkutan karena harus menunggu pengganggarannya dalam APBD perubahan. Sementara daerah yang dapat melakukan perubahan mendahului APBD perubahan juga bukan berarti tidak menghadapi masalah lanjutan. Mereka tetap mengalami kendala terutama karena proses perubahan tersebut membutuhkan waktu yang relatif lama (Sekber DAK, 2016). Sementara itu beberapa permasahalan teknis di sektor perencanaan DAK antara lain adalah adanya ketidaksesuaian antara rencana kegiatan DAK dengan kebutuhan daerah, masih adanya ego sektoral antar komponen pemerintahan daerah (misalnya dinas dan DPRD), masih kurangnya komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan DAK, misalnya ketidaksiapan lahan untuk pelaksanaan DAK infrastruktur ke-PU-an (PFID, 2023).

Di sektor pelaksanaan, beberapa masalah pengelolaan DAK yang terjadi di daerah misalnya adalah kurangnya sosialisasi kebijakan terkait DAK. Minimnya sosialisasi kebijakan DAK mengakibatkan pengelola di daerah salah persepsi atau pemahaman atas berbagai kebijakan baru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat (Kementerian/Lembaga atau pembina DAK). Lebih jauh lagi kemudian beberapa daerah tidak berani melaksanakan kegiatan DAK tertentu karena khawatir terjadinya tabrakan ketentuan antar regulasi terkait pengelolaan dana taransfer dan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Dengan begitu, proses pelaksanaan tender pekerjaan kegiatan DAK terus menjadi permasalahan yang menonjol di daerah dari sisi pelaksanaan (Sekber DAK, 2016). Sementara dari sisi teknis pelaksanaan DAK, beberapa kendala yang kerap dihadapi oleh daerah antara lain masih adanya pelaksanaan DAK yang tidak mengikuti petunjuk pelaksanaan, adanya ketidaksesuaian dengan DED, RAB, dan time schedule dalam pelaksanaan DAK, dan kekurangan atau kesalahan perhitungan pelaksanaan kegiatan DAK dalam hal kenaikan harga satuan, keterlambatan material, sampai perhitungan pajak (PFID, 2023).

Sedangkan dari sektor monev dan pelaporan beberapa permasalahan yang kerap dihadapi dalam pengelolaan DAK oleh pemerintah daerah antara lain keterbatasan anggaran untuk melakukan monitoring dan evaluasi sementara cakupan daerah cukup luas. Dampaknya monev hanya dilakukan pada daerah-daerah yang terjangkau dan minim biaya atau yang terburuknya adalah tidak ada kegiatan monev. Turunan masalahnya adalah permasalahan pengelolaan DAK tidak dapat terpetakan dan diselesaikan masalahnya secara proporsional dan tepat. Selain itu masih ada juga permasalahan terkait ketidakseragaman alur dan format pelaporan DAK yang ditetapkan oleh K/L dengan pelaporan DAK regulasi lainnya. Hal ini diujungnya akan berdampak pada tingkat kepatuhan pelaporan daerah yang relatif rendah. Kendala pengelolaan DAK di sektor monev dan pelaporan lainnya adalah beberapa provinsi kurang responsif dan kurang proaktif dalam menerima dan menyampaikan pelaporan kabupaten/kota ke pusat, selain juga daerah cenderung hanya mengirimkan laporan penyerapan keuangan DAK ke Kemenkeu,

kurang melaporkan capaian pelaksanaan kegiatan ke K/L pembina teknis. Dampaknya data laporan daerah menjadi sangat minim dan kurang adanya masukan yang cukup proporsional dari pembina teknis DAK ketika daerah menghadapi permasalahan pengelolaan secara teknis. Terakhir, permasalahan di sektor monev dan pelaporan DAK adalah tidak adanya mekanisme *reward dan punishment* dalam pelaporan. Selain berdampak pada minimnya kualitas pengelolaan DAK, kinerja pelaksanaan tidak terpantau karena permasalahan-permasalahan sebelumnya, tidak adanya reward dan punishment membuat daerah akan terus mempraktikkan kebiasaan pengelolaan yang kurang baik dalam pelaksanaan kegiatan DAK (sekber DAK, 2016). Sementara secara teknis, pada sektor monev dan pelaporan, beberapa permasalahan pelaksanaan DAK yang masih sering terlihat di daerah antara lain tidak adanya proses validasi atas hasil monitoring dan evaluasi, belum adanya evaluasi bersama multistakeholder, pelaporan DAK belum dijalankan secara berkala, seringnya pergantian ASN di daerah tanpa dibarengi *transfer knowledge* yang memadai (PFID, 2023).

Permasalahan pengelolaan DAK di atas terjadi di banyak daerah, bahkan di daerah-daerah yang secara goegrafis dekat dengan pemerintah pusat, seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Penelitian ini sendiri akan mengambil sampel pengelolaan DAK di Kota Bekasi. Di samping Kota Bekasi sangat terjangkau untuk diteliti baik dalam arti geografis maupun ketersediaan data dan sumbernya, banyak hal menarik dan mengundang pertanyaan untuk diteliti lebih jauh dari pengelolaan DAK fisik di kota yang pendapatan asli daerahnya termasuk yang terbesar baik di Jawa Barat maupun nasional ini. Beberapa komponen menarik dan ingin diteliti lebih jauh oleh penulis dari fakta DAK fisik di Kota Bekasi antara lain adalah alokasi DAK fisik, belanja modal, dan proporsinya dari kapasitas keuangan yang dimiliki, lalu angka-angka capaian pembangunan infrastruktur yang ada sampai dengan saat ini. Isu besarnya disini mungkin terkait kapasitas dan komitmen dalam penyediaan infrastruktur. Khusus terkait komitmen, menarik juga untuk dilihat mengenai penyusunan kebijakan di tingkat lokal sampai dengan kelembagaan dan SDM pengelola DAK. Berikutnya yang menarik diteliti juga adalah soal bagaimana

Pemerintah Kota Bekasi memprioritaskan pembangunan infrastruktur dari alokasi DAK. Isu utamanya di sini adalah bagaimana menjaring prioritas pembangunan daerah, bagaimana Pemerintah merencanakan dan menetapkan target pembangunan, sampai dengan bagaimana kegiatan DAK dikelola, dimonitor dan dievaluasi.

Kota Bekasi dalam banyak hal memiliki kesamaan dengan potret nasional, termasuk dalam pengelolaan DAK, meski pada saat yang sama juga memiliki beberapa perbedaan. Berbeda dengan potret alokasi DAK fisik secara nasional, misalnya, alokasi DAK fisik yang diterima oleh Kota Bekasi dalam lima tahun terakhir justru selalu meningkat. Alokasi DAK fisik yang diterima Kota Bekasi meningkat dari hanya sekitar Rp 32 miliar di tahun 2018 menjadi Rp 62 miliar di tahun 2022. Proporsi peningkatan alokasi DAK fisik di Kota Bekasi bahkan pernah menyentuh angka 33% yang terjadi pada tahun 2020. Artinya, meskipun alokasi DAK fisik secara nasional terus menurun pasca Covid-19, bahkan menurun tajam dari 2019 ke 2020 sebesar -22%, alokasi DAK fisik di tahun-tahun yang sama di Kota Bekasi justru selalu meningkat (Portal Data TKDD DJPK, 2023). Lebih lengkapnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 2 Perkembangan Alokasi DAK Fisik Kota Bekasi 2018-2022

Sumber: Portal Data TKDD, DJPK Kemenkeu, diolah

Peningkatan alokasi DAK fisik idealnya berkontribusi pada pemenuhan layanan kepada masyarakat Kota Bekasi melalui pembangunan berbagai infrastruktur yang didanai dari DAK. Artinya secara normatif dapat dikatakan bahwa pertambahan penerimaan alokasi DAK fisik Kota Bekasi, mustinya akan dibarengi dengan semakin terpenuhinya target dan membaiknya layanan di sektorsektor yang juga didanai DAK fisik seperti jalan, irigasi, air minum, sanitasi, dan perumahan dan pemukiman.

Data capaian beberapa indeks infrastruktur Kota Bekasi dimana beberapa komponennya didukung oleh kegiatan pembangunan DAK fisik sampai dengan tahun 2021 memperlihatkan kondisi yang belum ideal. Indeks infrastruktur ke-PU-an yang menggambarkan kondisi capaian pembangunan seluruh komponen infrastruktur ke-PU-an seperti jalan, irigasi, air minum, sanitasi, dan perumahan dan permukiman capaiannya secara umum sampai dengan 2021 masih berada di angka 43,66. Sementara jika dilihat lebih spesifik pada indeks perumahan permukiman dan pertanahan sampai dengan 2021 baru mencapai nilai 48.53. Sedangkan indeks sarana prasarana perhubungan masih di angka 76,44 sampai dengan 2021 (Data Pembangunan Kota Bekasi/tabang.bekasikota.go.id 2023). Data-data indeks infrastruktur di atas menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah Pemerintah Kota Bekasi untuk mencapai pemenuhan layanan bagi seluas mungkin masyarakatnya.

Tabel 1 Capaian Beberapa Indikator Pembangunan Kota Bekasi tahun 2021

Indeks Infrastruktur	Capaian
Indeks Infrastruktur Ke-PU-an	43,66
Indeks Perumahan Permukiman dan Pertanahan	48,53
Indeks Sarana Prasarana Perhubungan	76,44

Sumber: Data Pembangunan Kota Bekasi

Penelitian ini sendiri tidak dalam kapasitas untuk menganalisis seluruh kegiatan DAK infrastruktur dan capaian indeks infrastruktur sebagaimana telah dijelaskan di atas. Penelitian ini akan fokus pada pengelolaan dan hasil dari pelaksanaan DAK air minum di Kota Bekasi. Penelitian ini menurut penulis memiliki nilai penting karena beberapa hal, antara lain:

- air minum merupakan bagian dari urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan dimandatkan oleh UU No. 23 Tahun 2014 untuk menjadi prioritas perencanaan dan anggaran daerah.
- 2) pembangunan air minum menjadi salah satu prioritas nasional dan menargetkan akses layak sebesar 100%, akses aman sebesar 15%, dan akses jaringan perpipaan sebesar 30% dengan target penambahan sampai dengan 2024 sebanyak 10 juta sambungan rumah (RPJMN 2020-2024).
- 3) salah satu dukungan pemenuhan layanan dasar air minum didapat dari alokasi DAK air minum yang targetnya adalah penambahan akses air minum jaringan perpipaan yang sampai dengan 2021 capaiannya di Kota Bekasi baru di kisaran 19,2%, masih jauh dari pemenuhan target nasional di tahun 2024.
- 4) Kota Bekasi memiliki APBD reltif besar di level Jawa Barat dan Nasional, dukungan APBD dan DAK air minum yang diperoleh tampak belum cukup meningkatkan akses air minum jaringan perpipaan menuju pencapaian target air minum aman yang menjadi fokus dari pembangunan air minum secara nasional.

Dukungan pembangunan air minum di Kota Bekasi yang anggarannya berasal dari DAK jumlahnya dari 2019 sampai 2022 cenderung meningkat. Alokasi DAK air minum yang diperoleh Kota Bekasi mengalami peningkatan lebih dari tiga kali lipat (344%) dalam periode tersebut. Hanya sekali mengalami penurunan yaitu dari tahun 2021 ke tahun 2022. Dengan tidak mencantumkan alokasi di tahun 2018 karena tidak adanya data di DJPK, rincian alokasi DAK air minum Kota Bekasi 2019-2022 adalah sebagai berikut.

10,702,150

4,773,000

3,363,933

1,074,213

2019
2020
2021
2022

Grafik 3 Alokasi DAK Air Minum Kota Bekasi 2019-2022 (dalam ribu rupiah)

Sumber: DJPK Kemenkeu dan Bappeda Kota Bekasi, data diolah

Sementara dari sisi capaian pelaksanaan pembangunan air minum, dukungan DAK sebagian besarnya menyasar pada peningkatan akses air minum jaringan perpipaan. Dalam konteks itu, capaian akses air minum jaringan perpipaan Kota Bekasi sampai dengan 2022 baru mencapai 22,8%. Capaian angka tersebut jelas masih jauh tertinggal dari target nasional di tahun 2024 yang menetapkan target sebesar 30%. Melihat sisa waktu target sampai dengan 2024 yang hanya menyisakan dua tahun, maka Pemerintah Kota Bekasi butuh kolaborasi pembangunan di sektor air minum dengan memanfaatkan seluruh potensi dan alternatif pendanaan yang tersedia.

Dukungan pemenuhan target pembangunan tentu tidak bisa hanya mengandalkan alokasi DAK. Agar target pembangunan tercapai sesuai dengan yang direncanakan perlu kolaborasi pendanaan lain seperti inisiatif pembangunan infrastruktur pemerintah daerah yang berasal dari alokasi APBD di luar pendapatan dari dana transfer atau kerja sama baik antar pemerintahan maupun antar pemerintah dengan instansi bisnis dan swasta dari dalam maupun luar negeri. Inisiatif pembangunan model tersebut menjadi penting dan strategis, terlebih lagi RPJMN 2020-2024 juga menjadikan salah satu sasaran dari pengalokasian DAK adalah dalam rangka mendorong skema alokasi transfer berbasis kinerja (*output based transfer*) bagi daerah dengan kapasitas fiskal tinggi yang melakukan inisiatif pembangunan infrastruktur. Artinya, jika pemerintah daerah berinisitaif melakukan

pembangunan dengan anggaran yang dimilikinya, maka akan mendapatkan insentif yang dapat digunakan untuk memperluas cakupan pembangunan infrastruktur dan dampak ekonominya bagi masyarakat.

Dalam rentang waktu 2018-2021 indeks kapasitas fiskal daerah Kota Bekasi selalu berada dalam kategori sangat tinggi, bahkan termasuk lima daerah dengan kapasitas fiskal tertinggi di seluruh Indonesia. Pendapatan daerah yang bersumber dari dana alokasi khusus dalam periode tersebut juga nilainya selalu meningkat. Dengan kondisi tersebut, Kota Bekasi idealnya akan dengan mudah meningkatkan alokasi belanja daerah untuk pembangunan infrastruktur yang direpresentasikan melalui belanja modalnya. Dengan kata lain, melalui skema DAK, ditambah tingginya kapasitas fiskal Kota Bekasi, belanja modal pembangunan infrastruktur Kota Bekasi mustinya juga meningkat, tinggi. DAK dalam posisi tersebut dapat dikatakan menjadi pengungkit (*trigger*) bagi peningkatan anggaran pembangunan infrastruktur.

Tidak berbanding lurus dengan posisi kapasitas fiskal daerahnya, proporsi belanja modal Kota Bekasi dalam lima tahun terakhir sayangnya malah terlihat cenderung menurun. Persentase belanja modal yang menjadi representasi belanja untuk pembangunan infrastruktur terhadap total belanja di Kota Bekasi dalam beberapa tahun terakhir terlihat secara umum mengalami penurunan. Total belanja modal Kota Bekasi menurun dari 22% dari total belanja APBD pada tahun 2018 menjadi 19,8% di tahun 2021, bahkan pernah hanya menyentuh angka 15% di tahun 2020, ketika konsentrasi alokasi belanja daerah dicurahkan pada penanganan Covid-19 (Portal Data APBD DJPK Kemenkeu). Dengan kondisi tersebut, secara sederhana dapat dikatakan bahwa komitmen pembangunan infrastruktur Kota Bekasi belum cukup prporsional jika dibandingkan dengan kapasitas fiskal yang dimilikinya. Proporsi belanja modal Kota Bekasi bahkan berada di angka rata-rata daerah lain yang memiliki kapasitas fiskal bahkan lebih kecil darinya. Jika dikaitkan dengan alokasi DAK, data proporsi belanja modal Kota Bekasi di atas menyimpulkan bahwa DAK fisik yang dialokasikan ke Kota Bekasi terlihat kurang

mendongkrak komitmen Pemerintah Kota Bekasi untuk meningkatkan alokasi belanja modal dalam rangka memenuhi kebutuhan penyediaan infrastruktur. Hal tersebut juga dapat dimaknai bahwa Pemerintah Kota Bekasi belum cukup berinisiatif untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur dari belanja APBDnya, padahal sudah distimulus dengan alokasi DAK fisik yang jumlah penerimaannya selalu meningkat.

Dari uraian terkait capaian pembangunan infrastruktur Kota Bekasi yang terlihat belum cukup proporsional di atas (minimal tergambar dari capaian beberapa indeks infrastrukturnya), dukungan pembangunan infrastrukur yang dilaksanakan kelihatannya belum menyasar secara tepat pada permasalahan yang ada di Kota Bekasi. Maka dari itu, karena DAK fisik jelas bermaksud mendukung pemenuhan target pembangunan infrastruktur dimaksud, tampaknya perencanaan dan prioritisasi usulan DAK fisik Kota Bekasi juga belum tepat mengidentifikasi, menggambarkan dan menjawab permasalahan yang ada. Berkaca dari kondisi tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh, menggali informasi, dan kemudian menjelaskan bagaimana pengelolaan DAK fisik di Kota Bekasi. Dengan menggunakan penelitian kualitatif, penelitian akan coba mengkompilasi berbagai data dan informasi dari sumber langsung di Kota Bekasi, melihat potret dan mengolah/menganalisis data dan informasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, sampai identifikasi masalah dan solusi yang diambilnya dalam pengelolaan DAK fisik di Kota Bekasi.

B. Identifikasi Masalah

Penelitian ini dilakukan terutama berdasarkan identifikasi permasalahan pengelolaan DAK fisik di daerah yang antara lain adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya proses pengelolaan DAK fisik. Pengelolaan DAK fisik di Kota Bekasi, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, sampai dengan monitoring dan evaluasi belum dilakukan secara efektif dan efisien.

Perencanaan DAK fisik air minum Kota Bekasi, misalnya, hingga kini belum berjalan optimal, belum dilakukan berjenjang dari bawah dengan memanfaatkan Musrenbang level kelurahan dan kecamatan sampai menjadi usulan kegiatan di level Kota. DAK air minum yang diusulkan akhirnya belum menggambarkan kebutuhan paling utama dan menjadi permasalahan real di level masyarakat.

- Pembangunan infrastruktur DAK fisik, termasuk DAK air minum, belum berdasarkan pada prioritas pembangunan daerah dan belum cukup signifikan dukungannya terhadap pemenuhan target prioritas pembanguan air minum secara nasional. Kemungkinannya bisa jadi karena rencana kegiatan DAK air minum belum terintegrasi dengan prioritas pembangunan Kota Bekasi, atau sebaliknya agenda pembangunan yang belum direncanakan dan dibuatkan skala prioritasnya, sehingga kegiatan DAK air minum yang dialokasikan menjadi kurang terarah dan kurang terukur dukungannya terhadap target pembangunan air minum dalam skala lebih luas. Masalah yang dapat diidentifikasi dari kondisi demikian adalah mungkin kegiatan DAK di Kota Bekasi belum terrencanakan dengan optimal, belum dilaksanakan sesuai dengan acuan rencananya, belum termonitor dan terevaluasi capaian kerjanya, dan laporan sampai ke capaian outputnya kemudian menjadi tidak maksimal. Akibat lanjutannya adalah kontribusi alokasi DAK air minum terhadap peningkatan capaian pembangunan air minum Kota Bekasi masih sangat minim, sehingga pembangunan air minum Kota Bekasi tercatat tertinggal cukup jauh dibandingkan dengan target nasionalnya.
- 3. Alokasi DAK fisik, seperti DAK air minum, yang cenderung bertambah belum cukup meningkatkan akses air minum jaringan perpipaan masyarakat secara signifikan. Faktanya, alokasi DAK air minum Kota Bekasi dari 2019 ke 2022 meningkat lebih dari 4 kali lipat, namun capaian akses air minum jaringan perpipaannya hanya meningkat sebanyak 3,2% atau rata-rata hanya meningkat 0,8% pada tiap tahunnya. Dengan kondisi tersebut, pengelolaan DAK air

minum di Kota Bekasi tampaknya belum optimal dalam mencapai target outputnya. Sehingga ke depan yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kota Bekasi adalah perbaikan strategi dan maksimalisasi sumber daya pembangunan yang dimiliki dalam mendukung pengelolaan DAK air minum yang lebih baik.

C. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penelitian ini akan fokus pada upaya menjelaskan permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

- 1. Mengapa capaian akses air minum jaringan perpipaan Kota Bekasi masih di bawah target nasional?
- 2. Bagaimana strategi Pemerintah Kota Bekasi dalam meningkatkan capaian akses air minum jaringan perpipaan?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian, yaitu:

- Untuk mengidentifikasi mengapa capaian akses air minum jaringan perpipaan Kota Bekasi masih di bawah target nasional.
- 2. Untuk menyusun strategi bagaimana Pemerintah Kota Bekasi dapat meningkatkan capaian akses air jaringan perpipaan.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini dalam skala lebih luas diharapkan akan membawa manfaat pada pengayaan diskursus akademis dalam tema pengelolaan DAK fisik di daerah. Dalam konteks yang lebih luas, penelitian ini akan berkontribusi pada pengayaan wacana dan studi kasus dalam kajian akademik untuk tema

kebijakan publik, desentralisasi fiskal, perencanaan dan efektivitas dana transfer ke daerah, dan sebagainya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, jika dihubungkan dengan kebijakan dan pengelolaan DAK di sektor pemerintahan, hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat untuk menjadi acuan terutama bagi evaluasi atas pengelolaan DAK fisik di daerah, lebih khusus lagi pada upaya menjawab permasalahan yang kerap dihadapi oleh daerah dalam mengelola alokasi DAK fisik.

Di samping itu, pada level kebijakan dan mungkin juga penyusunan regulasi, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menjadi rujukan bagi perbaikan kebijakan dan pengayaan regulasi teknis pengelolaan DAK fisik sehingga ke depan pelaksanaan kegiatan DAK benar-benar dapat menjawab permasalahan di daerah di satu sisi dan mendukung target pembangunan nasional pada sisi lainnya.

POLITEKNIK STIALAN JAKARTA